

CAPAIAN PROGRAM PNPM MANDIRI MELALUI PROGRAM SIMPAN PINJAM PEREMPUAN UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA SAWARNA KECAMATAN BAYAH

ACHIEVEMENT OF PNPM MANDIRI PROGRAM THROUGH SAVING LOANS PROGRAM FOR COMMUNITY EMPOWERMENT IN SAWARNA VILLAGE BAYAH DISTRICT

(disubmit 28 Februari 2018, direvisi 1 Mei 2018, diterima 30 Juni 2018)

Yusniah Anggraini

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten
Corresponding Author: yusnia.anggraini@gmail.com

ABSTRAK

Terwujud sebuah pembangunan yang berlandaskan pada pemberdayaan, yakni melalui sebuah program pemerintah bernama ‘Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri). Penelitian ini mengenai program PNPM Mandiri yang berfokus pada Capaian Program PNPM Mandiri Pedesaan melalui program simpan pinjam perempuan (SPP) untuk pemberdayaan masyarakat di desa sawarna kecamatan bayah. Dari ketiga program bidang yang ada tulisan ini akan membahas program pembangunan di bidang ekonomi. Yang dalam implementasinya di Desa Sawarna, program ini disebut sebagai ‘Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, dengan informan adalah para Perempuan anggota kelompok di kecamatan tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara, dan instrumennya berbentuk pedoman wawancara. Adapun teknik analisis datanya adalah analisis data secara induktif. Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa, pada proses pelaksanaannya PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Sawarna menghasilkan dampak positif dan negatif bagi masyarakat (perempuan). Diantaranya telah mampu membantu masyarakat lokal dalam meningkatkan taraf hidup mereka, khususnya para perempuan di lingkungan desa sawarna. Melalui Program SPP kaum perempuan menjadi berdaya dan dapat mampu bermetamorfosa menjadi pribadi yang aktif. Dengan bantuan dana yang diberikan kepada kaum perempuan sehingga mampu mengembangkan usaha mikro yang mereka miliki menjadi lebih baik, serta mereka mampu terbebas dari jeratan ‘bank keliling’. Akan tetapi masih ada kekurangan dari pelaksanaan program tersebut, sehingga program SPP menjadi kurang maksimal. Maka dalam hasil penelitian ini akan disajikan beberapa rekomendasi untuk melengkapi kekurangan yang ada.

Kata Kunci : Program PNPM mandiri, Program simpan pinjam perempuan, Pemberdayaan Masyarakat Desa Sawarna

ABSTRACT

A development based on empowerment is realized, namely through a government program called 'Mandiri Community Empowerment National Program (PNPM Mandiri). This research is about the PNPM Mandiri program which focuses on the Achievement of the PNPM Mandiri Rural Program through the women's savings and loan program (SPP) for community empowerment in Sawarna village, Bayah sub-district. Of the three field programs that exist this paper will discuss development programs in the economic field. Which in its implementation in Sawarna Village, this program is referred to as the 'Women's Savings and Loan Program (SPP). The method used in this study is a qualitative descriptive method, with informants being women group members in the sub-district. Data collection techniques used are interview techniques, and the instruments are in the form of interview guidelines. The data analysis technique is inductive data analysis. The field findings show that, in the implementation process of PNPM Mandiri Rural in Sawarna Village produced positive and negative impacts on the community (women). Among them have been able to help local people improve their lives, especially women in the Sawarna village. Through the SPP Program women become empowered and can be able to morph into an active person. With financial assistance given to women so that they can develop their own micro-businesses to be better, and they are able to be free from the entanglement of 'mobile banks'. However, there are still shortcomings in the implementation of the program, so that the SPP program becomes less than optimal. So in the results of this study there will be a number of recommendations to complement the shortcomings.

Keywords: PNPM mandiri program, the Save Program loan women, empowerment of village community Sawarna

PENDAHULUAN

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan atau PNPM Perdesaan), merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah tingkat pedesaan. Tujuan utama program ini adalah untuk membantu mensejahterakan masyarakat di tingkat pedesaan dengan memandirikan anggotanya. Program PNPM ini terdiri dari tiga program pokok yang sudah disusun oleh pemerintah pusat, yaitu pembangunan ekonomi, sosial, dan

lingkungan. Pembiayaan program ini berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta dana hibah dari sejumlah lembaga pemberi bantuan. PNPM Mandiri sendiri diresmikan oleh Presiden RI pada tanggal 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Program ini dalam pelaksanaannya memusatkan pada kegiatan bagi masyarakat miskin di wilayah pedesaan. Program ini menyediakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat/ kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat

(BLM) kepada masyarakat secara langsung. Dalam pelaksanaan programnya seluruh anggota masyarakat diajak untuk dapat terlibat langsung dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, hingga pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya.

Program ini sangat strategi dalam menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa “lembaga kepemimpinan masyarakat” yang representatif, mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial (*sosial capital*) masyarakat di masa mendatang, serta menyiapkan “program masyarakat jangka menengah dalam penanggulangan kemiskinan” yang menjadi pengikat dalam kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat. Lembaga kepemimpinan masyarakat tersebut, dapat disebut juga sebagai Badan atau Lembaga Keswadayaan Masyarakat (disingkat BKM/ LKM) dibentuk melalui kesadaran kritis masyarakat untuk menggali kembali nilai – nilai luhur kemanusiaan dan nilai – nilai kemasyarakatan sebagai pondasi modal sosial kehidupan masyarakat. BKM/ LKM diharapkan mampu menjadi wadah perjuangan bagi masyarakat miskin dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka, sekaligus menjadi motor penggerak

sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan, mulai dari proses penentuan, pengambilan keputusan, proses penyusunan program, pelaksanaan program hingga pemanfaatan dan pemeliharaan. Mengenai Simpan Pinjam Perempuan (SPP) melalui program PNPM Pedesaan yang terletak di Desa Sawarna, Kecamatan Bayah. Program ini merupakan salah satu produk program pembangunan PNPM Pedesaan di bidang pembangunan ekonomi. Program tersebut diperuntukkan untuk para wanita yang akan memulai usaha dan/ atau yang sudah mempunyai usaha. Dalam berjalannya program ini terdapat beberapa pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang berperan dalam berjalannya program tersebut, yaitu: pihak aparat desa (Kades, Sekdes, dan Fasilitator Desa), UPK (Unit Pelaksana Kegiatan), TPK (Tim Pelaksana Kegiatan), monitoring dan juga Anggota KSPP (Kelompok Simpan Pinjam Perempuan) itu sendiri sebagai penerima manfaat.

Pemberdayaan masyarakat lokal dapat dilakukan oleh semua orang maupun semua instansi dan organisasi. Dalam lingkup penelitian, masalah mengenai peran program pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Sawarna menjadi salah satu permasalahan yang akan di bahas. Dari ketiga program yang

dimiliki PNPM Mandiri tersebut, maka yang akan menjadi fokus penelitian ini adalah mengenai program ekonomi, yakni “Simpan Pinjam Perempuan” di dalam PNPM Mandiri Pedesaan untuk mengevaluasi sejauh mana capaian dan peran program pemerintah yang berskala nasional ini di Desa Sawarna, sehingga kita dapat mengetahui apakah dengan keberadaan PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Sawarna dapat menjadikan masyarakat setempat menjadi lebih berdaya atau tidak. Maksud dilaksanakannya penelitian ini adalah sejauh mana capaian program PNPM Mandiri melalui program simpan pinjam perempuan (SPP) untuk Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sawarna. Sehingga kita dapat mengetahui apakah dengan keberadaan PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Sawarna dapat menjadikan masyarakat setempat menjadi lebih berdaya atau tidak. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Memperoleh gambaran eksistensi Program Pemberdayaan PNPM di Desa Sawarna dan pasang surut dari program tersebut, khususnya program Simpan Pinjam Perempuan. Pendeskripsian ini berisikan sejarah awal masuknya program SPP di Desa Sawarna,
2. bagaimana kontribusi warga masyarakat Desa Sawarna dan Pemda terhadap capaian program tersebut,
3. bagaimana program dan kinerja program tersebut dalam memberdayakan masyarakat petani di Desa Sawarna, sehingga dari program PNPM tersebut mengalami kemajuan yang cukup pesat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di desa sawarna, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten selama 3 (tiga) bulan, yaitu bulan Maret - Juni 2016, dengan fokus penelitian masalah capaian program PNPM Mandiri melalui program simpan pinjam perempuan (SPP) untuk Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sawarna. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah ”metode deskriptif kualitatif.” Menurut Kirk dan Miller (2016), dalam penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif, data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Pengertian ini sejalan dengan maksud dari penelitian ini, yaitu penelitian ini hendak menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para perempuan anggota simpan pinjam perempuan di desa sawarna yang menyangkut capaian program PNPM Mandiri melalui program simpan pinjam perempuan (SPP) untuk Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sawarna tersebut yang diamati.

Informan dalam penelitian ini adalah para anggota SPP di desa sawarna,

Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak. Anggota yang dipilih sebanyak 10 orang. Informan penelitian dipilih dengan menggunakan teknik *purposive* (bertujuan).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara (*interview*) atau kuesioner lisan, yaitu dialog yang dilakukan oleh pewawancara (atau oleh peneliti) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (Arikunto, 2016). Alat atau instrumennya berbentuk pedoman wawancara, atau penulis menggunakan instrumen (alat) pedoman wawancara dalam melakukan interviu dengan informan. Adapun teknik analisis data yang digunakan mengacu pada Miles dan Huberman (2015), yaitu analisis data secara induktif melalui 4 (empat) tahapan analisis, yaitu: reduksi data (mencatat, meringkas, dan menganalisis data), tampilan data (penyajian data yang dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya), dan konklusi/verifikasi (penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Masuknya Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM Mandiri Pedesaan) merupakan sebuah program pemerintah yang berasal dari dana

APBN yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar menjadi lebih mandiri dan terberdaya. Secara umum PNPM Mandiri memiliki 3 program pokok yang dijalankan untuk memberdayakan masyarakat, yaitu program sosial, program ekonomi, dan program pembangunan fisik. Dalam pelaksanaannya kami menemukan, bahwa di Desa Sawar program yang baru dilaksanakan baru-baru ini adalah program pembangunan ekonomi dan fisik (khususnya, lingkungan/ infrastruktur). Hal ini dikarenakan, masuknya program PNPM Mandiri Pedesaan ke Desa Sawarna tersebut baru sekitar tahun 2009.

Program Simpan Pinjam Perempuan (selanjutnya disebut SPP) merupakan salah satu dari produk program pembangunan dengan fokus ekonomi yang dikeluarkan oleh PNPM Mandiri Pedesaan. Seperti namanya “Simpan Pinjam Perempuan”, program SPP ini memang difokuskan untuk pemberdayaan dan pembangunan khusus pada kaum perempuan saja. Kehadiran program SPP PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Sawarna diawali dengan adanya tawaran program dari pemerintah, yakni program dana pinjaman untuk Pembangunan Percepatan Desa Tertinggal (PPDT). Mengetahui adanya program tersebut, warga desa yang aktif dalam kegiatan pembangunan desa (seperti Fasilitator Desa) mengkonsepkan proposal yang akan diajukan. Setelah hal tersebut

mendapat respon baik dari warga desa maka selanjutnya diadakan musyawarah antar dusun untuk membahas mengenai penentuan dusun mana yang akan didahulukan dan kebutuhan apa yang harus diprioritaskan terlebih dahulu untuk kepentingan desa dan warga masyarakatnya (seperti apa pembangunan jalan dahulu atau bantuan modal guna pengembangan usaha masyarakat dulu). Kemudian hasilnya dimusyawarahkan kembali di kantor desa bila sudah ditentukan mana yang akan diprioritaskan, maka oleh Faskel akan langsung diajukan ke Kecamatan. Namun, ternyata di Kecamatan hasil tersebut masih harus dimusyawarahkan kembali dengan kepentingan desa lainnya, untuk menentukan desa mana dulu yang mendapat dana bantuan pembangunan dari PNPM Mandiri Pedesaan terlebih dahulu.

Penentuan desa mana yang mendapat lebih dulu ditentukan berdasarkan desa mana yang lancar dalam pengembalian dana dan yang memiliki potensial terbesar dalam memberdayakan masyarakatnya. Setelah ditentukan bahwa desa Sawarna mendapatkan dana bantuan PNPM Mandiri Pedesaan lebih dulu, maka kemudian dipilihlah para ketua KSPP yang akan bertanggung jawab dalam pengelolaan dana dan penentuan penerima manfaat. Ketua KSPP pun dipilih dari warga perempuan yang aktif dalam kegiatan pembangunan

desa dan aktif dalam mengikuti penyuluhan/ sosialisasi dari PNPM Mandiri Pedesaan.

Pemangku Kepentingan dalam Pelaksanaan Pencapaian Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

Dalam pelaksanaan program SPP PNPM Mandiri Pedesaan ini terdapat beberapa *stakeholder* (pemangku kepentingan) yang memiliki peranan penting mulai dari masyarakat (pemanfaat), Ketua KSPP, Unit Pelaksana Kegiatan (UPK), Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Monitoring, dan aparatur desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Staf).

UPK berperan dalam menyalurkan dan menyimpan dana bantuan. TPK berperan sebagai penanggung jawab kegiatan dan mengawasi ketua kelompok selama berjalannya program. Monitoring berperan dalam mengawasi kinerja TPK selama berjalannya program tersebut. Masyarakat sebagai penerima manfaat dari bantuan dana tersebut dan ketua KSPP sebagai yang bertanggung jawab atas anggota dan dirinya sendiri dalam pengelolaan dana dan penentuan anggota penerima manfaat.

Aparatur desa sendiri memiliki banyak peran, diantaranya berperan dalam memfasilitasi jalannya program SPP (seperti menyediakan tempat untuk rapat atau penyuluhan dalam menyediakan sarana dan prasarana, berjalannya program

SPP (seperti melegalkan hasil keputusan rebug desa), dalam mengawasi jalannya program SPP, dan juga berperan dalam pembinaan (seperti membina saat penyuluhan dan membina anggota penerima manfaat yang telat atau kesulitan membayar iuran pengembalian dana SPP).

Fasilitator Desa (Fasdes) sebagai bagian dari aparat desa berperan dalam memfasilitasi jalannya program pembangunan desa. Dalam berjalannya program SPP ini, Fasilitas desa berperan dalam mensosialisasikan program SPP dan memfasilitasi masyarakat dalam mengajukan usulan ke desa dan mengajukan proposal ke UPK. Jadi Fasilitas desa bertanggung jawab dalam proses pengajuan permohonan dana pinjaman SPP dan juga saat ada hambatan dalam pengembalian iuran dana SPP ke UPK. Fasdes akan memberikan penyuluhan dan binaan kepada anggota kelompok SPP yang bermasalah. Agar seluruh warga desa mengetahui dan tertarik untuk mengikuti program SPP PNPM Mandiri Pedesaan ini, maka digunakan sarana sosialisasi melalui rapat-rapat di musyawarah dusun ataupun dalam penyuluhan- penyuluhan di kantor desa. Sosialisasi juga dilakukan hingga ke tingkat RT/RW melalui penyuluhan-penyuluhan.

Salah satu syarat utama untuk menjadi anggota penerima manfaat dana SPP ini pun, salah satunya diharuskan

sering mengikuti penyuluhan-penyuluhan yang diadakan oleh pihak PNPM Mandiri Pedesaan. Penyuluhan tersebut dilakukan secara berkelanjutan agar anggota penerima manfaat dana SPP ini paham betul tentang program dan tujuan akhir dari program SPP tersebut. Sehingga target penyaluran dana bantuan SPP menjadi tepat sasaran dan dapat membawa manfaat bagi warga masyarakat yang menggunakannya. Penyuluhan dilakukan sebanyak 5 (lima) hingga 7 (tujuh) kali pertemuan, yang membahas mengenai program SPP secara lebih mendalam.

Implikasi Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

Berdasarkan hasil wawancara, masuknya program SPP PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Sawarna mendapat respon yang sangat baik dari masyarakatnya. Karena banyak dari nara sumber mengungkapkan, bahwa mereka sangat tertarik sekali untuk turut serta dalam program SPP tersebut. Dengan adanya bantuan dana yang diberikan, mereka berharap dapat mengembangkan usaha mereka menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Dan masyarakat (khususnya, kaum perempuan) sangat berterima kasih dengan adanya bantuan dana SPP ini, karena sejak dilaksanakannya apa pun pemanfaat dapat menyelesaikan beberapa permasalahan ekonomi mereka, seperti bebas dari jeratan bank keliling dan kaum

perempuan di desa Sawarna dapat menjadi lebih mandiri dan berdaya, karena kini mereka tidak lagi hanya bergelut dalam ranah privat saja, akan tetapi juga sudah berada di ranah publik. Mereka sudah dapat bertransformasi menjadi perempuan yang aktif dalam beberapa kegiatan desa (salah satunya kegiatan PKK) dan mengelola serta mengembangkan usaha yang telah mereka miliki. Namun sangat disayangkan karena masih banyak masyarakat yang belum dapat merasakan bantuan dana tersebut untuk pengembangan usaha mikro mereka. Hal ini dikarenakan dana yang diberikan masih sangat sedikit sekali. Analisis dampak pemberian kredit simpan pinjam khusus perempuan (SPP) pada pendapatan RTM dikabupaten Sleman 2007-2010 oleh Istanto (2010). Hasil perhitungan menunjukkan bahwa pemberian kredit SPP berpengaruh terhadap pendapatan rumah tangga miskin penerima kredit di kabupaten Sleman. Pemberian kredit juga berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan rumah tangga responden. Analisis terkait efektifitas program PNPM-MP dalam rangka pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh Putra (2013).

Permasalahan dari Pelaksanaan Program SPP

Berdasarkan hasil temuan di lapangan terdapat seorang ketua kelompok yang menerima bantuan akan tetapi dia

tidak memiliki usaha dan batuan tersebut digunakan hanya untuk kebutuhan sehari-hari saja. Menurut yang bersangkutan ia mendapatkan bantuan karena ia sebagai pengurus TPK dan berfungsi untuk mendampingi anggota kelompoknya dalam kegiatan SPP dan ini kami anggap sebagai salah satu masalah dalam pelaksanaan SPP di Desa Sawarna. Karena adanya pelaksanaan pemberian bantuan dana dengan tidak tepat sasaran. Hasil penelitian menyebutkan bahwa Program PNPM Mandiri Perdesaan telah membawa perubahan kearah yang positif. Namun, secara keseluruhan terkait dengan keefektifitas masih belum bisa dikatakan efektif, hal ini dapat terlihat bahwa program ini masih belum mencapai sasaran yakni nasabah SPP belum bisa mengikuti program dikarenakan mereka tidak mempunyai usaha. Peran PNPM-MP dalam mengembangkan Usaha Kecil Mikro dalam peningkatan pendapatan.

Selain itu permasalahan yang ada yakni, masih banyak yang kurang maksimal dalam mengembangkan usaha (khususnya perempuan di tingkat mikro). Karena tidak adanya pelatihan yang berorientasi pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Tersendatnya proses pemberdayaan perempuan karena adanya keterbatasan dana yang diberikan oleh pemerintah sehingga target penerima

manfaat masih dalam sekup yang relatif sedikit. Berpotensi menimbulkan ketergantungan masyarakat terhadap dana SPP, dikarenakan tidak adanya penerapan aturan main yang tegas dan jelas, dalam hal ini berkaitan dengan batasan peminjaman dana. Padahal mengenai batasan peminjaman telah ditetapkan oleh pihak PNPM Mandiri Pedesaan. Hal ini karena tidak adanya sosialisasi yang jelas dari

pihak PNPM Mandiri itu sendiri. Tidak semua masyarakat mengetahui program SPP dan adanya perbedaan pada pemahaman dan pelaksanaan terhadap program SPP hal ini dikarenakan sosialisasi yang dilakukan kurang jelas dan tidak maksimal. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai permasalahan yang muncul dari pelaksanaan program SPP di Desa Sawarna dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1

Masalah dan Faktor Masalah

Masalah	Faktor Masalah
<ul style="list-style-type: none"> • Masih banyak yang kurang maksimal dalam mengembangkan usaha (khususnya perempuan di tingkat mikro). • Tersendatnya proses pemberdayaan perempuan. • Berpotensi menimbulkan ketergantungan masyarakat terhadap dana SPP. • Berpotensi pemanfaat menjadi tidak disiplin dalam pengembalian angsuran. • Tidak semua masyarakat mengetahui program SPP. • Adanya perbedaan pada pemahaman dan pelaksanaan terhadap program SPP. • Penyebaran bantuan menjadi tidak tepat sasaran. • Bentuk usaha pemanfaat tidak berkembang (monoton). • Dana SPP menjadi kurang bermanfaat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dana yang dikucurkan kurang. • Pencairan dana cukup lama (sekitar). • Keterbatasan dalam pemberian dana pinjaman. • Tidak adanya batasan peminjaman (Continuitas). • Tidak adanya sanksi yang tegas. • Kurang maksimalnya sosialisasi. • Alokasi target pemanfaat kurang selektif. • Belum adanya pelatihan peningkatan skill (keterampilan).

PERAN PROGRAM SPP DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Program SPP dalam Konsep Pemberdayaan

Kemiskinan pada negara – negara di dunia berkembang terjadi karena program – program pembangunan yang di keluarkan oleh pihak pemerintah tidak berhasil terealisasi di kehidupan masyarakat karena terhambat oleh berbagai faktor – faktor yang terjadi di internal maupun eksternal pemerintah. Sehingga kemiskinan seperti di Indonesia setiap tahun semakin bertambah, kegagalan pada program – program pembangunan terkadang dikarenakan program yang di keluarkan oleh pemerintah tidak melibatkan atau memberi kesempatan kepada masyarakat miskin untuk ikut serta dalam merencanakan, melaksanakan, monitoring, dan juga evaluasi program – program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah. Dengan kata lain, masyarakat miskin hanya menjadi objek penderita yang hanya menerima semua keputusan – keputusan dari pemerintah walaupun terkadang keputusan itu tidak memihak kepada rakyat miskin.

Baru – baru ini pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan sebuah program yang bernama program PNPM Mandiri baik kota maupun masyarakat desa. Dimana dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri

tersebut menggunakan sebuah konsep pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan sendiri adalah menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam mengemukakan pendapat, bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatnya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidak berdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri) maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil). Dalam hal ini, SPP sebagai suatu program pemberdayaan masyarakat, dalam kegiatannya secara tidak langsung menerapkan proses pemberdayaan masyarakat karena SPP mawadahi masyarakat dalam hal pengembangan ekonomi sosial. Program SPP memberikan sarana dan fasilitas dengan memberi

pinjaman modal usaha yang di khususkan untuk perempuan. Dalam proses pemberdayaan yang di keluarkan dalam program SPP ini proses pengorganisasian dan pengelolaan monitoring dan evaluasi melibatkan para anggota peminjam yang di khususkan untuk perempuan dengan membuat sebuah kelompok simpan pinjam perempuan.

Pola Pengorganisasian Program SPP dalam Teori Siklus Organisasi dan Struktural Fungsional

Dalam perjalannya, setiap organisasi pasti mengalami pasang surut, hal tersebut dapat disebut sebagai siklus organisasi. Siklus organisasi terdiri dari empat tahapan, yakni tahap lahirnya organisasi, tahap tumbuhnya organisasi, tahap kemunduran organisasi, dan tahap kematian organisasi. Tahap tumbuhnya organisasi adalah proses awal bagaimana sebuah organisasi dapat terbentuk. Tahap tumbuhnya organisasi berarti proses jalannya organisasi mulai dari merintis hingga menuju kepada titik kesuksesan. Tahap kemunduran organisasi adalah tahapan siklus hidup dimana organisasi gagal mengantisipasi, menyadari, menghindari, netral atau mengadaptasi tekanan internal dan atau eksternal yang mempengaruhi pertahanan hidup jangka panjang.

Pada penelitian ini kami akan mencoba menganalisis pasang surut Program SPP dengan menggunakan teori –

teori organisasi. Dengan begitu akan terlihat secara jelas mengenai perjalanan hidup dari organisasi lokal tersebut. Sehingga akan dapat mempermudah dalam membantu para pembaca untuk memahami Program SPP pada Desa Sawarna secara mendalam. Dalam pelaksanaan program SPP ini pengoorganisasian berawal dari pihak UPK yang memberi informasi kepada pihak TPK selanjutnya pihak TPK dan Monitoring mensosialisasi dan menyeleksi kepada masyarakat untuk membuat KSPP dan selanjutnya di ajukan oleh pihak fasilitator desa kepada UPK dan pencairan dana melalui pihak TPK kepada KSPP, bagian monitoring selanjutnya melakukan pengawasan dari berjalannya program SPP ini. Sehingga dalam penjabaran di atas membentuk sebuah sistem organisasi yang di dalamnya terdapat sebuah struktur fungsional dimana didalam sebuah sistem tersebut terdapat mekanisme hubungan – hubungan peran masing – masing sistem di dalam sebuah organisasi SPP. Apabila salah satu sistem itu tidak menjalankan tugasnya dengan baik maka akan mengganggu kinerja sistem lainnya. Dalam penelitian ini pada program SPP di desa Sawarna terdapat sebuah penyakit atau kendala – kendala dalam pelaksanaan program SPP tersebut. Di dalam pihak UPK bertugas sebagai sistem pemberi sosialisasi dan penanggung jawab program SPP ini kurang

melaksanakan tugasnya dengan benar, seperti UPK yang seharusnya menjadi pusat pengelolaan dalam tingkat kecamatan bertugas memberi proses sosialisasi dan pemberian pelatihan – pelatihan kepada pihak KSPP tidak terealisasi. Proses sosialisasi atau adaptasi hanya dilakukan awal – awal pencairan modal, setelah itu tidak adanya perkumpulan rutin dengan pihak KSPP untuk proses sosialisasi dan pemberian pelatihan – pelatihan lanjutan untuk menambah skill para anggota KSPP, hal ini dapat mengganggu kinerja mekanisme program SPP yang seharusnya dapat memberdayakan menjadi kurang efektif dalam pelaksanaannya di lapangan karena tidak adanya indikator – indikator yang kongkret tentang keberhasilan dari pihak UPK untuk mengetahui efektifitas organisasi SPP.

Bukan hanya pihak UPK saja yang tidak menjalankan fungsinya dengan benar, ternyata pihak TPK dan Monitoring terdapat disfungsi dalam pemberian dan penyeleksian KSPP yang masih bersifat nepotisme, dan pihak monitoring kurang dalam pengawasan karena masih terjadi kecurangan dan praktek manipulasi dalam pelaksanaan program tersebut yang disebabkan kurangnya sosialisasi dan efektifitas organisasi di dalamnya. Sedangkan pihak KSPP juga mengalami disfungsi dalam pemilihan anggotanya,

karena bersifat nepotisme berdasarkan saudara, kerabat atau teman dekat sehingga program SPP ini tidak merata kepada pihak yang benar – benar membutuhkan. Kurangnya sosialisasi juga mengakibatkan KSPP kurang mengetahui mekanisme dari program tersebut. Pihak fasilitator desa yang seharusnya sebagai fasilitator dalam program ini tidak melibatkan KSPP dalam pengajuan pembuatan proposal sehingga KSPP tidak tahu menahu mengenai prosedur pembuatan proposal untuk pengajuan pinjaman.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan terlihat, bahwa hubungan antar sistem di organisasi tidak berjalan dengan baik sehingga merusak sebuah berjalannya sistem pengorganisasian program SPP tersebut. Akibatnya mekanisme pemberdayaan tidak berjalan dengan baik pada program SPP tersebut. Selanjutnya, kami akan mengulas proses keterlekatan antara peminjam dan pemberi modal.

Pola Keterlekatan dalam pelaksanaan Program SPP

Konsep ini digunakan untuk menjelaskan fenomena perilaku ekonomi dalam hubungan sosial. Konsep keterlekatan menurut Granovetter, merupakan tindakan ekonomi yang disituasikan secara sosial dan melekat dalam jaringan sosial personal yang sedang berlangsung di antara para aktor. Hal ini

tidak hanya terbatas pada tindakan aktor individual sendiri, tetapi juga mencakup perilaku ekonomi yang lebih luas, seperti penetapan harga dan institusi-institusi ekonomi yang semuanya terpendam dalam suatu jaringan hubungan sosial. Cara seorang terlekat dalam jaringan hubungan sosial adalah penting dalam penentuan banyaknya tindakan sosial dan jumlah dari hasil institusional.

Dalam penerapan program SPP sendiri keterlekatkan ini terjadi pada pihak penyelenggara dengan pihak peminjam atau yang disebut KSPP (Kelompok Simpan Pinjam Perempuan). Inilah yang akan membentuk jaringan sosial dalam program SPP. Keterlekatkan ini terjadi pada sebuah kata yang disebut kepercayaan, kepercayaan antara pemberi modal dan penerima modal ini terjadi pada pencairan dana dan pengembalian modal. Hal ini bisa terjadi karena terdapat jaringan hubungan sosial yang sudah berlangsung lama dalam sebuah masyarakat. Dalam teori keterlekatkan ini, sistem kepercayaan dapat memudahkan para peminjam sebagai modal tambahan usaha mereka karena bersifat bebas dari anggunan, karena pihak pengelola berasal dari elemen masyarakat sekitar, karena itu program SPP ini bersifat dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya sistem kepercayaan ini bisa menjadi boomerang

dalam program SPP ini karena hanya mengandalkan sistem kepercayaan, tidak terdapat sanksi yang jelas apabila terjadi kredit macet dalam pelaksanaannya. Dan terkadang dalam sistem kepercayaan dari jaringan hubungan sosial bisa berakibat, seperti ulasan sebelumnya (yaitu nepotisme dalam kalangan teman dekat, kerabat, dan saudara). Inilah yang menjadi kekurangan dalam teori keterlekatkan yang didasarkan dengan rasa percaya yang dapat menjadi penghambat apabila sistem pengorganisasiannya tidak cukup jelas (bedasarkan hasil temuan di lapangan). Dengan sistem keterlekatkan yang dibentuk oleh pola pengorganisasian KSPP dan pihak UPK ini tidak adanya aturan – aturan yang jelas dalam pengembaliannya karena pinjaman SPP ini bebas dari anggunan, sehingga sanksi bagi yang tidak mengembalikan uang pinjaman tersebut kurang tegas karena tidak adanya anggunan yang memaksa mereka untuk membayar pinjaman hanya berdasarkan rasa kepercayaan semata.

KESIMPULAN

Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) telah berjalan di Desa Sawarna selama 8 tahun, yakni mulai dari tahun 2009 sampai dengan 2016, dengan jumlah Kelompok Simpan Pinjam Perempuan sebanyak 15 kelompok. Pada tahun 2009 sebanyak 4 (empat) kelompok dan tahun 2016 bertambah sebanyak 11 kelompok.

Dalam pelaksanaannya program yang bertujuan guna memberdayakan perempuan ini, di satu sisi memiliki nilai positif yaitu mampu memberikan manfaat bagi kaum perempuan dan dari sisi negatif memiliki kekurangan dari aturan – aturan yang ada belum sesuai . Manfaat yang dirasakan oleh para target sasaran program ini (perempuan) yaitu: terbebasnya masyarakat dari jeratan “*bank keliling*”, mampu mengembangkan usaha mikro yang telah kaum perempuan miliki sebelum menerima bantuan modal (seperti: usaha kredit pakaian, warung kelontong, jual pulsa elektrik, dan lain sebagainya) , menjadikan wanita lebih berdaya dan mandiri sehingga mampu bertransformasi ke ranah publik dan hal ini terwujud dalam aktivitas kaum perempuan yang meningkat (seperti: aktif dalam kegiatan PKK, mampu mengelola usaha mikro yang mereka miliki, dan lain sebagainya).

Dan hal yang menjadi kekurangan dalam pelaksanaan program SPP ini, yakni: *pertama*, dikarenakan belum adanya pelatihan peningkatan *skill* (keterampilan), pemberian dana SPP menjadi kurang bermanfaat bagi targetnya. Sehingga, masih banyak anggota kelompoknya yang kurang maksimal dalam mengembangkan usaha (khususnya perempuan di tingkat mikro), sehingga mengakibatkan tersendatnya proses pemberdayaan perempuan di desa Sawarna.

Kedua, karena kurang maksimalnya sosialisasi, sehingga berpotensi menimbulkan ketergantungan masyarakat terhadap dana SPP dan tidak semua masyarakat mengetahui program SPP. Karena terdapat perbedaan pemahaman dan pelaksanaan terhadap program SPP. *Ketiga*, kurang tegasnya sanksi yang diberikan, berpotensi pemanfaat menjadi tidak disiplin dalam pengembalian angsuran. *Keempat*, kurang selektifnya alokasi dana SPP menyebabkan penyebarannya menjadi tidak tepat sasaran.

Berdasarkan dari kajian – kajian teori terhadap program SPP ini terlihat sekali bahwa kurangnya akan sistem pengorganisasian yang jelas dan sosialisasi pada program tersebut. Semua itu akan dapat menimbulkan permasalahan yaitu masih kurang maksimalnya dalam meningkatkan usaha mikro bagi KSPP. Berpotensi dapat menimbulkan ketergantungan karena sistem pengorganisasian yang tak jelas dan sanksi yang tidak tegas, sehingga masyarakat beranggapan bahwa pinjaman ini akan terus menerus ada semua ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi. Kurangnya sosialisasi juga dapat menimbulkan hambatan perputaran dana SPP dan dana pinjaman tersebut hanya bersifat monoton karena masyarakat pada umumnya tidak mengetahui mengenai pinjaman SPP tersebut. Adanya praktek

nepotisme dalam penurunan atau pencairan dana SPP tidak tepat sasaran dan tidak merata yang disebabkan oleh hal tersebut. Dengan hal – hal yang terjadi seperti di atas mengakibatkan tersendatnya proses pemberdayaan perempuan yang di rencanakan secara struktural fungsional karena terjadinya disfungsi – disfungsi pada penerapan di lapangannya.

REKOMENDASI

Berdasarkan permasalahan yang muncul maupun hal-hal yang berpotensi menjadi masalah dari pelaksanaan Program SPP di Desa Sawarna, ada beberapa rekomendasi untuk dapat melengkapi dan memperbaiki kekurangan dari pelaksanaan Program SPP tersebut yaitu :

1. Menambah jumlah anggaran dana pinjaman SPP.
2. Proses pencairan dana dipercepat, dengan mempersingkat waktu penyuluhan SPP. Agar lebih efisien dan efektif, dan pada akhirnya pemanfaat dapat mengembangkan usahanya lebih cepat.
3. Adanya batasan pinjaman maksimal yang diberikan pada pemanfaat. Agar masyarakat lainnya dapat merasakan pula bantuan dana.
4. Adanya indikator penilaian kemandirian bagi pemanfaat yang sudah mandiri.
5. Apabila sudah ada pemanfaatan yang mandiri, agar dimitrakan dengan bank atau swasta agar dapat meminjam modal lebih besar, sehingga usaha mereka dapat berkembang lebih besar.
6. Harus terdapat sanksi yang tegas agar pelaksanaan SPP dapat berjalan dengan baik. Sehingga apabila terdapat kendala kemacetan dalam pengembalian dapat terselesaikan secara cepat.
7. Sosialisasi harus disampaikan secara utuh mulai dari TPK, Ketua KSPP, Monitoring, Aparatur Desa, Fasdes, dan Masyarakat. Sehingga para stakeholder dapat memahami PNPM Mandiri Pedesaan dan program yang ada di dalamnya (pembangunan fisik dan ekonomi) secara utuh. Dan pada akhirnya program yang dijalankan dapat berjalan sesuai dengan prosedur dan aturan main.
8. Penentuan penerima manfaat harus sesuai dengan aturan main dan prosedur program yang sudah ditentukan.
9. Pemilihan ketua harus lebih selektif, orang yang berkompeten, lebih memahami program dengan baik, dan lebih objektif.
10. Dalam pemberian dana SPP juga harus objektif.
11. Harus ada pelatihan guna peningkatan keterampilan dan pengetahuan bagi masyarakat (baik perempuan dan laki-

laki) dalam rangka pemberdayaan masyarakat (seperti: pelatihan manajemen keuangan, pelatihan pembuatan kerajinan yang memanfaatkan SDA di desa, pelatihan membuat kue, pelatihan menjahit, dsb).

12. Bermitra dengan lembaga yang berkompeten dengan pelatihan-pelatihan tersebut.
13. Melibatkan pihak swasta untuk mendapatkan modal usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Istanto, F. 2010. Analisis dampak pemberian kredit simpan pinjam khusus perempuan (SPP) pada pendapatan rumah tangga miskin di Kabupaten Sleman, 2007-2010. Tesis: Universitas Gajah Mada,
- Kirk, J dan M. L. Miller. 2016. *Reliabilitas dan Validitas Calam Riset Kualit* diterjemahkan oleh Munrsandi, dkk. Jakarta: Rineka Cipta.
- Miles, B Matthew dan C. Huberman. 2015. *Analisis Data Kualitatif*. Termahan Moleong. Jakarta: Bumi Aksara.
- Putra, S. D. 2013. Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dalam Rangka Pemberdayaan Perempuan di Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 1 (1): 112-122
- Arikunto, S. 1996. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.